

## Menggagas Tumbuhnya Agropolitan

Oleh : Iwan Nugroho \*

Provinsi Jawa Timur memiliki delapan kawasan andalan yang menjadi motor pertumbuhan (Pemprov Jatim, 2005), yakni (i) Gerbang-kertosusila, (ii) Malang dan sekitarnya, (iii) Tuban dan sekitarnya, (iv) Probolinggo-Pasuruan dan sekitarnya, (v) Situbondo-Bondowoso-Jember dan sekitarnya, (vi) Madiun dan sekitarnya, (vii) Banyuwangi dan sekitarnya, serta (viii) Kediri-Tulungagung-Blitar dan sekitarnya. Tiap wilayah memiliki karakteristik atau struktur ekonomi yang khas. Gerbangkertosusila dan Malang yang relatif berkembang menampilkan struktur ekonomi yang

berimbang. Sektor jasa dan manufaktur telah beroperasi optimal untuk menghasilkan nilai tambah (share PDRB pertanian kurang dari 10 persen). Tuban dan sekitarnya (Tuban-Bojonegoro), dan Probolinggo-Pasuruan sedang berbenah menerima aliran investasi pada sektor manufaktur, terutama yang mengolah produk-produk pertanian dan kebutuhan (share PDRB pertanian kurang dari 25 persen). Sementara wilayah lainnya (Situbondo-Bondowoso-Jember, Madiun, Banyuwangi, serta Kediri-Tulungagung-Blitar) masih menampilkan struktur ekonomi yang relatif berat ke sektor produksi pertanian (dengan rata-rata share PDRB sektor pertanian di atas 50 persen). Wilayah terakhir memerlukan kesiapan dan peningkatan faktor-faktor aksesibilitas (investasi dan infrastruktur) dan sumberdaya manusia (SDM).



Upaya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal di Jawa Timur memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif. Ada dua sasaran yang ingin dicapai dan saling berkaitan. Pertama, menyasikan pertumbuhan antara wilayah. Aktivitas ekonomi di semua wilayah menghasilkan dinamika ekonomi yang signifikan, yakni gerakan maupun aliran penduduk, informasi, barang dan jasa, investasi, dan keuntungan (*benefit*) dan kerugian (*cost*) yang proporsional. Seluruh potensi wilayah dimanfaatkan diimbangi aliran kesejahteraan pada masing-masing wilayah. Tidak ada lagi divergensi *benefit* dan *cost* sebagai dampak pemusatan ekonomi yang berlebihan. Program pembangunan bidang transportasi jalan lintas selatan dan jembatan Suramadu menjadi sangat relevan untuk mencapai sasaran ini.

## MENGAGAS TUMBUHNYA AGROPOLITAN<sup>1</sup>

Provinsi Jawa Timur memiliki delapan kawasan andalan yang menjadi motor pertumbuhan (Pemprov Jatim, 2005), yakni (i) Gerbangkertosusila, (ii) Malang dan sekitarnya, (iii) Tuban dan sekitarnya, (iv) Probolinggo-Pasuruan dan sekitarnya, (v) Situbondo-Bondowoso-Jember dan sekitarnya, (vi) Madiun dan sekitarnya, (vii) Banyuwangi dan sekitarnya, serta (viii) Kediri-Tulungagung-Blitar dan sekitarnya. Tiap wilayah memiliki karakteristik atau struktur ekonomi yang khas. Gerbangkertosusila dan Malang yang relatif berkembang menampilkan struktur ekonomi yang berimbang. Sektor jasa dan manufaktur telah beroperasi optimal untuk menghasilkan nilai tambah (*share* PDRB pertanian kurang dari 15 persen). Tuban dan sekitarnya (Tuban-Bojonegoro), dan Probolinggo-Pasuruan sedang berbenah menerima aliran investasi pada sektor manufaktur, terutama yang mengolah produk-produk pertanian dan kehutanan (*share* PDRB pertanian sekitar 25 persen). Sementara wilayah lainnya (Situbondo-Bondowoso-Jember, Madiun, Banyuwangi, serta Kediri-Tulungagung-Blitar) masih menampilkan struktur ekonomi yang relatif berat ke sektor produksi pertanian (dengan *share* PDRB sektor pertanian di atas 35 persen). Wilayah terakhir memerlukan kesiapan dan peningkatan faktor-faktor aksesibilitas (investasi dan infrastruktur) dan sumberdaya manusia (SDM).

Upaya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal di Jawa Timur memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif. Ada dua sasaran yang ingin dicapai dan saling berkaitan. **Pertama**, menyeraskan pertumbuhan antar wilayah. Aktifitas ekonomi di semua wilayah menghasilkan dinamika ekonomi yang signifikan, yakni gerakan maupun aliran penduduk, informasi, barang dan jasa, investasi, dan keuntungan (*benefit*) dan

---

<sup>1</sup> Naskah dipublikasi di TEROPONG, Balitbang Provinsi Jatim. 21 (Mei-Juni 2005):22-26. ISSN 1412-8829.

kerugian (*cost*) yang proporsional. Seluruh potensi wilayah termanfaatkan diimbangi aliran kesejahteraan pada masing-masing wilayah. Tidak ada lagi divergensi *benefit* dan *cost* sebagai dampak pemusatan ekonomi yang berlebihan. Program pembangunan bidang transportasi jalan lintas selatan dan jembatan Suramadu menjadi sangat relevan untuk mencapai sasaran ini.

**Tabel 1. PDRB Sepuluh Kabupaten dan Kota Terbesar di Provinsi Jawa Timur, tahun 2003**

No	Kabupaten/Kota	PDRB	Proporsi PDRB Sektoral			PDRB per kapita	Pertumbuhan ekonomi
			Pertanian	Manufaktur	Jasa dan lainnya		
		miliar rp	persen			juta rp	persen
1	Surabaya	53767	0.33	30.93	68.74	20210	4.93
2	Kediri Kota	22412	0.36	78.13	21.51	88924	3.41
3	Sidoarjo	21131	5.05	43.00	51.95	12561	4.23
4	Gresik	14656	11.86	45.93	42.21	13828	4.90
5	Pasuruan	11861	20.63	36.99	42.38	8354	4.42
6	Malang Kab	10156	35.94	8.52	55.54	4342	3.64
7	Malang Kota	9425	1.03	33.29	65.68	12279	3.85
8	Jember	8600	39.34	5.24	55.42	3853	4.13
9	Banyuwangi	7784	36.62	9.04	54.34	5055	3.70
10	Tuban	7116	20.65	14.08	65.27	6607	4.20
	<i>Jawa Timur</i>	254380	20.01	26.35	53.64	7026	3.41

Sumber: PDRB Kota dan Kabupaten se Jawa Timur (BPS, 2004)

**Kedua** menyerasikan pertumbuhan antar sektor ekonomi. Sektor pertanian, manufaktur dan jasa perlu ditumbuhkan secara proporsional. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian menjadi titik kritikal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Dalam keadaan normal, seyogyanya ia tumbuh tidak kurang dari 3.5 persen; dan dibanding pertumbuhan ekonomi manufaktur tidak kurang dari 4 persen. Ada beberapa alasan yang mendasarinya:

- (i) Sektor pertanian masih memelihara sekitar 40 persen tenaga kerja atau menampung 17 juta jiwa. Mereka akan memperoleh kenaikan kesejahteraan bila pertumbuhan ekonomi pertanian sedikitnya dua persen di atas pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk rata-rata provinsi Jawa Timur sebesar 0.7 persen (Sensus 2000).

- (ii) Sektor pertanian menyimpan faktor-faktor non ekonomi (seperti kelembagaan, lingkungan dan budaya) yang memiliki manfaat dan perlu dipelihara keberlanjutannya. Untuk memelihara manfaat tersebut, memerlukan sinergi dengan sektor manufaktur dalam aspek spasial. Pengalaman ini sudah terjadi dalam konversi sawah (menjadi industri) khususnya di jalur Pantura Jawa Barat sehingga menghasilkan dampak sosial yang signifikan pada periode 1980 dan 1990an. Saat itu, pertumbuhan manufaktur mencapai sedikitnya 9 persen sementara sektor pertanian tumbuh kurang tiga persen. Jawa Timur patut bersyukur hal itu tidak terjadi (Dick, Fox and Mackie, 1997).
- (iii) Jawa Timur (atau di wilayah Indonesia manapun) memiliki sumberdaya ekonomi (investasi, sumberdaya alam, dan teknologi) terbatas namun dengan jumlah penduduk sangat tinggi. Alokasi sumberdaya ekonomi memerlukan kehati-hatian agar manfaatnya terdistribusi merata kepada 35 juta orang, khususnya 17 juta jiwa di sektor pertanian. Bandingkan dengan sumberdaya ekonomi Malaysia yang sebesar empat kali PDRB Jawa Timur namun hanya dibagi kepada 18 juta penduduk. Dengan kata lain penduduk Malaysia memperoleh kue kesejahteraan setara 8 kali dibanding penduduk Jawa Timur (sehingga ada *joke*: walaupun di Malaysia ada korupsi, namun masyarakatnya masih kebagian manfaat ekonomi)

Sasaran pertama dan kedua akan mengawal perjalanan ekonomi Jawa Timur secara berkelanjutan. Pertanyaannya adalah program macam apa yang relevan untuk itu? Sektor-sektor mana yang mendapat perhatian utama? Siapa pelaku ekonomi dan berapa jumlahnya yang memperoleh manfaat? Di wilayah mana program difokuskan? Jawaban-jawaban pertanyaan tersebut menuntun kepada lahirnya strategi kebijakan pembangunan di Jawa Timur.

## **Agropolitan**

Konsep pembangunan agropolitan diangkat dari pemikiran Myrdal dalam konteks negara-negara Asia yang umumnya berpenduduk padat, serta sistem pertaniannya *labor intensive* dalam skala usaha kecil. Friedmann and Douglas (1978) dalam Mercado (2002) mengimplementasikan gagasan Myrdal ke dalam konsep pembangunan **agropolitan**. Agropolitan merupakan pendekatan pembangunan *bottom-up* untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan pendapatan lebih cepat dibanding strategi *growth pole*. Karakteristik agropolitan meliputi (i) skala geografi relatif kecil, (ii) proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang bersifat otonom dan mandiri berdasarkan partisipasi masyarakat lokal, (iii) diversifikasi tenaga kerja pedesaan pada sektor pertanian dan non pertanian, menekankan kepada pertumbuhan industri kecil (iv) adanya hubungan fungsional industri pedesaan - perkotaan dan *linkages* dengan sumberdaya struktur ekonomi lokal, dan (v) pemanfaatan dan peningkatan kemampuan sumberdaya dan teknologi lokal.

Awalnya, konsep agropolitan distrik dari Friedmann berwujud pusat-pusat pelayanan di wilayah pedesaan, dengan radius pelayanan 5 hingga 10 km dan dengan jumlah penduduk 50 hingga 150 ribu jiwa serta kepadatan minimal 200 jiwa per km<sup>2</sup>. Jasa-jasa dan pelayanan disesuaikan dengan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial budaya setempat. Di Jawa, pusat-pusat pelayanan tersebut dikenal dengan nama pasar Pahing, Pon, Wage atau Kliwon, sejalan dengan volume permintaan dan penawaran mingguan untuk jenis komoditi yang berbeda. Program lain yang serupa, misalnya pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Unit Desa (BUUD), atau Listrik Masuk Desa.

Konsep agropolitan saat sekarang dikaitkan dengan pembangunan sistem agribisnis yang terintegrasi. Di dalam wilayah agropolitan disediakan berbagai fungsi layanan untuk

mendukung berlangsungnya kegiatan agribisnis. Fasilitas pelayanan meliputi sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan, peralatan), sarana penunjang produksi (lembaga perbankan, koperasi, listrik), serta sarana pemasaran (pasar, terminal angkutan, sarana transportasi). Implementasi agropolitan adalah adanya wilayah sentra produksi pertanian yang memiliki kota pertanian (ada yang menyebut agropolis) sebagai pusat pelayanan agribisnis yang melayani, mendorong dan memacu pembangunan pertanian wilayah-wilayah sekitarnya. Agropolitan tidak ditentukan oleh batasan administrasi, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi yang ada.

Program pembangunan agropolitan di Indonesia dimulai pada tahun 2002 melibatkan berbagai sektor di delapan provinsi (Tabel 2). Basis pertanian dalam program pembangunan agropolitan mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan. Pada tahun 2003, program lebih diperluas lagi karena yang memiliki nilai strategis sehingga mencapai total 29 provinsi di luar DKI Jakarta. Setiap propinsi mengembangkan 1 (satu) wilayah agropolitan yang spesifik dengan keunggulan lokasinya (Tabel 2).

**Tabel 2. Wilayah Agropolitan di Indonesia**

No	Propinsi	Kota/Kab Agropolitan	Komoditi/Basis Agribisnis
1	Sumatera Barat	Agam	Sapi
2	Bengkulu	Rejang Lebong	jagung, sayuran
3	Jawa Barat	Cianjur	Sayuran, Bunga-bunga
4	DI Yogyakarta	Kulon Progo	Biofarmaka
5	Bali	Bangli	Kopi, Jeruk
6	Sulawesi Selatan	Barro	Sapi
7	Gorontalo	Boalemo	Jagung
8	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Coklat, jagung
9	NAD Aceh	Aceh Besar	Sapi
10	Sumatera Utara	Tapanuli Utara, Simalungun, Toba Samosir, Dairi, dan Karo	Sayuran
11	Lampung	Lampung Tengah	Padi, jagung, kedele
12	Babel	Belitung	Manggis, lada
13	Riau	Indragiri Hilir	Kelapa, padi
14	Jambi	anjung Jabung Timur	Kedele, sapi potong
15	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir (OKI), Ulu (OKU)	Padi, hortikultura
16	Banten	Pabdeglang	Palawija, durian
17	Jawa Barat	Kuningan	Sapi
18	Jawa Tengah	Semarang, Pemalang	Tanaman hias, farmaka, sapi

19	Jawa Timur	Mojokerto, Banyuwangi	Palawija
20	Bali	Tabanan	Peternakan
21	Nusa Tenggara Barat	Dompu	Sapi
22	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Sapi
23	Sulawesi Utara	Minahasa	Kentang, wortel, sayuran
24	Sulawesi Tengah	Donggala	kakao, sapi, ikan
25	Sulawesi Tenggara	Kendari	sapi
26	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah	Jeruk, sayuran
27	Kalimantan Tengah	Kapuas	Sapi
28	Kalimantan Barat	Pontianak	Lidah buaya, pepaya, sayuran
29	Papua	Jayapura	Kakao

Nomer 1 hingga 8 ditetapkan tahun 2002, Nomer 9 hingga 29 ditetapkan tahun 2003

Sumber: [www.deptan.go.id](http://www.deptan.go.id)

Pentingnya keterpaduan semakin memperluas cakupan wilayah agropolitan. Propinsi Sumatera Utara mengembangkan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan (KADTBB) yang terdiri lima Kabupaten. Keterkaitannya yang sangat erat dengan daerah dataran medium dan rendah dalam sistem agribisnis, sehingga menghasilkan hubungan antar wilayah tidak dapat dipisahkan sama sekali. Total luas KADTBB mencapai 19.162,25 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 79 kecamatan, mencakup kabupaten-kabupaten Tapanuli Utara (6.062 km<sup>2</sup>), Simalungun (4387 km<sup>2</sup>), Toba Samosir (3441 km<sup>2</sup>), Dairi (3146 km<sup>2</sup>), dan Karo (2127 km<sup>2</sup>). Wilayah agropolitan provinsi Sumatera Selatan juga melibatkan dua kabupaten, yakni Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Komering Ulu (OKU).

### **Bagaimana Agropolitan di Jawa Timur?**

Sebagian besar akademisi ilmu pertanian sering berseloroh, Jawa Timur adalah miniatur Indonesia. Hampir semua komoditi pertanian di Indonesia ditemukan di Jawa Timur, kecuali kelapa sawit. Ini yang menjadi daya tarik peneliti asing untuk senantiasa masuk ke Jawa Timur untuk mendalami bidang ilmu pertanian di Indonesia. Data-data berikut sudah sangat umum diketahui. Jawa Timur secara umum memproduksi rata-rata 35 persen tanaman pangan dan hortikultura nasional. Komoditi perkebunan yang dominan meliputi tebu, kopi, kakao, dan tembakau. Komoditi perikanan darat dan laut juga signifikan. Propinsi ini juga memiliki populasi unggas terbesar mencapai 45 persen nasional (data diperoleh dari [www.deptan.go.id](http://www.deptan.go.id)). Komoditi-komoditi tersebut menyebar

ke berbagai sentra produksi di kabupaten dan kota. Pertanyaannya adalah model agropolitan mana yang relevan dikembangkan. Apakah hanya kabupaten Mojokerto dan Banyuwangi (Tabel 2), yang hanya berbasis agribisnis palawija.

Pengembangan agropolitan yang berkelanjutan seyogyanya mempertemukan aspek-aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Aspek lingkungan dan sosial terwakili oleh keadaan sistem produksi pertanian (*on-farm*) dan masyarakat pada sentra-sentra produksi pertanian. Kinerja dua aspek ini lumayan baik terbukti dengan dominasi produksi Jawa Timur di tingkat nasional. Yang masih agak mengganggu adalah aspek ekonomi, yang dicerminkan oleh kinerja faktor-faktor *off-farm* dan penunjangnya. Wilayah agropolitan yang menampilkan sistem agribisnis akan menghasilkan aliran manfaat ekonomi untuk menjamin keberlanjutan. Hal tersebut ditandai dengan transformasi struktur ekonomi wilayah yang menunjukkan kenaikan peran sektor manufaktur yang berbasis *on-farm*. Pada wilayah tersebut biasanya terjadi proses pembelajaran yang luar biasa pada masyarakatnya dalam hal berwirausaha (*entrepreneurship*). Masyarakat biasanya mampu mengapresiasi lembaga keuangan, pengolahan dan mutu komoditi. Tidak kalah pentingnya telah tersedia sarana infrastruktur jalan, pasar, transportasi, bank, telepon, air bersih, listrik dan prasarana umum lain. Pertanyaannya adalah dimana wilayah tersebut?

Penulis mengajukan usulan wilayah tersebut adalah kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo. Sedikitnya ada tiga alasan yang mendasar. **Pertama**, keduanya menyajikan *share* PDRB sektor manufaktur wilayah kabupaten tertinggi (sekitar 40 persen) di Jawa Timur (BPS, 2004), mencerminkan kesiapan SDMnya dalam berwirausaha. Mereka juga menyajikan angka PDRB per kapita wilayah kabupaten tertinggi selain Gresik (Tabel 1). **Kedua**, kedua wilayah saling berdekatan sehingga menghasilkan sinergi wilayah pasar



(Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, 2004). Hal ini makin relevan dengan akan dibangunnya Pasar Induk Agrobisnis di Desa Jemundo, Kabupaten Sidoarjo (Pemprov Jatim, 2005). **Ketiga**, akses transportasi darat dan kedekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan bandara Juanda menguntungkan sebagai terminal ekspor komoditi pertanian dari seluruh wilayah di Jatim (Tabel 3).

Adapun basis komoditi agropolitan kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo dapat diperluas sesuai keunggulannya. Komoditi dengan keunggulan komparatif (*locational advantage*) meliputi perkebunan (mangga, apel, tebu), perikanan (bandeng), horikultura (sayuran dataran tinggi) dan peternakan (susu) sapi dan unggas. Sementara komoditi dengan keunggulan kompetitif meliputi tanaman hias, kerajinan kayu dan mebel (dari hasil hutan). Dataran tinggi di kabupaten Pasuruan, yakni Nongkojajar, Puspo, dan Prigen telah menjadi tujuan investasi (lokal atau dari luar wilayah) untuk pengembangan komoditi pertanian komersial secara alamiah maupun dikaitkan dengan permintaan sektor pariwisata.

Hadirnya agropolitan Pasuruan-Sidoarjo diyakini akan menstimulasi kawasan-kawasan andalan pertumbuhan yang ada. Arus informasi, teknologi, komoditi dan jasa pertanian mengalir lebih dinamik diimbangi aliran kesejahteraan khususnya kepada masyarakat petani. Pasar menjadi mudah diakses dan dipahami tanpa tafsir oleh petani maupun konsumen. Hadirnya Pasar Induk Agrobisnis di Desa Jemundo Kabupaten Sidoarjo akan menjadi sumber ide, acuan atau kerangka berpikir bagi sub-sub terminal agrobisnis di kabupaten-kabupaten yang selama ini berkembangnya kurang sistematis.

**Tabel 3. Analisis SWOT Agropolitan Kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo**

Agribisnis	Kekuatan	Kelemahan	Tantangan	Peluang
Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Industri alat/mesin</li> <li>▪ Industri pupuk, pestisida</li> <li>▪ Akses yang tinggi ke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan input produksi belum optimal karena keterbatasan kepemilikan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skala ekonomi harus besar agar efisien</li> <li>▪ Teknologi tepat guna masih dapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar domestik masih besar</li> <li>▪ Pendanaan dari swasta atau luar negeri</li> </ul>

	faktor-faktor produksi pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teknologi tepat guna belum tersosialisasi</li> </ul>	dikembangkan	
<b>On-farm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sentra produksi ikan, pangan, tebu, mangga, hortikultura, kehutanan</li> <li>▪ Kesuburan tanah</li> <li>▪ Mutu bibit belum baik</li> <li>▪ Usaha tani intensif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah dan mutu produksi belum optimal</li> <li>▪ Keterbatasan lahan</li> <li>▪ Harga berfluktuasi</li> <li>▪ Pola tanam belum teratur/optimal</li> <li>▪ Usaha tani perorangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lahan pertanian/ikan terancam konversi ke industri/pemukiman</li> <li>▪ Bersaing dg wilayah lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program revitalisasi pertanian</li> <li>▪ Tujuan pasar banyak</li> <li>▪ Pendanaan dari swasta atau luar negeri</li> </ul>
<b>Hilir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berkembang sektor manufaktur pangan olahan, kulit, mebel</li> <li>▪ Berkembang industri kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Industri kecil manajemen tradisionil</li> <li>▪ Belum mampu ekspor langsung</li> <li>▪ Belum ada akses ke standar mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Industri pengolahan memberikan nilai tambah tinggi</li> <li>▪ Bersaing dengan industri sejenis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar ekspor</li> <li>▪ Networking dengan pasar ekspor</li> <li>▪ Pendanaan dari swasta atau luar negeri</li> </ul>
<b>Penunjang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Infrastruktur air bersih, listrik, telekomunikasi memadai</li> <li>▪ Akses ke Juanda Airport, Tanjung Perak, transportasi ke Surabaya, Yogyakarta, Bali, dan Malang lancar</li> <li>▪ Memiliki Pasuruan Industrial Estate Rembang</li> <li>▪ Sektor pariwisata telah berkembang</li> <li>▪ Dekat dengan perguruan tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transportasi masih sering macet</li> <li>▪ Fasilitas <i>cold storage</i> di pelabuhan ekspor perlu ditingkatkan</li> <li>▪ Sistem agribisnis belum terbentuk</li> <li>▪ Tingkat konsumsi domestik rendah</li> <li>▪ Manajemen Pariwisata masih lemah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Egoisme birokrasi/wilayah</li> <li>▪ Tujuan wisata bersaing dengan Bali, Yogyakarta</li> <li>▪ Agrowisata</li> <li>▪ Ecotourism Taman nasional Bromo, Tengger, Semeru belum optimal</li> <li>▪ Hasil-hasil riset/kajian perguruan tinggi belum dimanfaatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar Ekspor</li> <li>▪ Pendanaan dari swasta atau luar negeri</li> <li>▪ Networking dg tujuan wisata</li> <li>▪ Investor pengembangan jalan</li> <li>▪ Otonomi daerah</li> <li>▪ Pasar Induk Agribisnis di Desa Jemundo Kabupaten Sidoarjo segera dibangun</li> <li>▪ Kerjasama dengan perguruan tinggi</li> </ul>

Implementasi usulan kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan sebagai Agropolitan propinsi Jatim memerlukan serangkaian persiapan. Banyak hal masih perlu dibenahi untuk memperbaiki kelemahan sekaligus menangkap peluang-peluang (Tabel 3) pengembangan agropolitan. Komitmen pemerintah menjadi syarat mutlak untuk mendayagunakan seluruh sumberdaya dua kabupaten tersebut. Tabel 4 menyajikan peran pemerintah (kabupaten, provinsi dan pusat) dalam berbagai kegiatan mulai dari landasan aturan, mekanisme pembinaan, pengelolaan informasi hingga monitoring dan evaluasi.

**Tabel 4. Peran Pemerintah dalam Program Agropolitan**

No	Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten/kota	Provinsi	Pusat
1	Landasan aturan			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Petunjuk Teknis/Petunjuk Praktis</li> </ul>	√		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Petunjuk Teknis</li> </ul>		√	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modul/Model Program</li> </ul>			√
2	Sosialisasi / Apresiasi ke Aparat dan masyarakat	√	√	√
3	Survey identifikasi dan penyusunan/pemantapan Master Plan Kawasan	√		
4	Pelatihan Manajemen Program Agropolitan	√	√	
5	Pendidikan dan Latihan			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberdayaan bagi petani pelaku agribisnis di pedesaan</li> </ul>	√		

	▪ Penyuluh / Petugas	√	√	
	▪ KTNA/Tokoh-tokoh petani		√	
6	Percontohan usaha agribisnis (dapat dikaitkan pinjaman bantuan langsung masyarakat atau PBLM)	√		
7	Penguatan kelembagaan agribisnis pada level	√	√	
	▪ KTNA/P4S, BPP dan Badan/Unit Pengelola sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA)	√		
	▪ Asosiasi petani, forum petani, lembaga keuangan mikro (LKM), Pasar, pengolahan hasil		√	√
8	Prasarana dasar dan sarana (on farm dan off farm) sesuai kebutuhan prioritas master plan dan kesejahteraan social	√		
9	Studi Banding	√	√	√
10	Pengembangan model usaha		√	√
11	Penyebaran informasi dan pelayanan teknologi untuk KKA		√	√
12	Promosi dan temu usaha	√		
13	Monitoring dan evaluasi	√	√	√

Sumber: diolah dari [www.deptan.go.id](http://www.deptan.go.id)

## Daftar Pustaka

BPS. 2004. PDRB Kota dan kabupaten Se Jawa Timur. BPS Jatim, Surabaya.

Dick, H., J. J. Fox and J. Mackie (eds.). Balanced Development: East Java in new order. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 500p.

Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan Penerbit LP3ES Jakarta

Pemprov Jawa Timur. 2005. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008. Draf.

Malang, 27 Juli 2005

Dr. Ir. Iwan Nugroho, MS  
Dosen Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian  
Universitas Widyagama Malang  
Penulis buku Pembangunan Wilayah, LP3ES Jakarta (2004).

Jl. Taman Borobudur 3 Malang  
Telp. 0341 492282 psw 314 Fax 0341 496919  
HP. 08123313170